

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Wisatawan Nusantara Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Haiqal Imansyah¹, Bambang Sambodo²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

E-mail : haiqalcs88@gmail.com, bambang sambodo@stie-pembangunan.ac.id

Article History:

Received: 01 Agustus 2024

Revised: 12 Agustus 2024

Accepted: 14 Agustus 2024

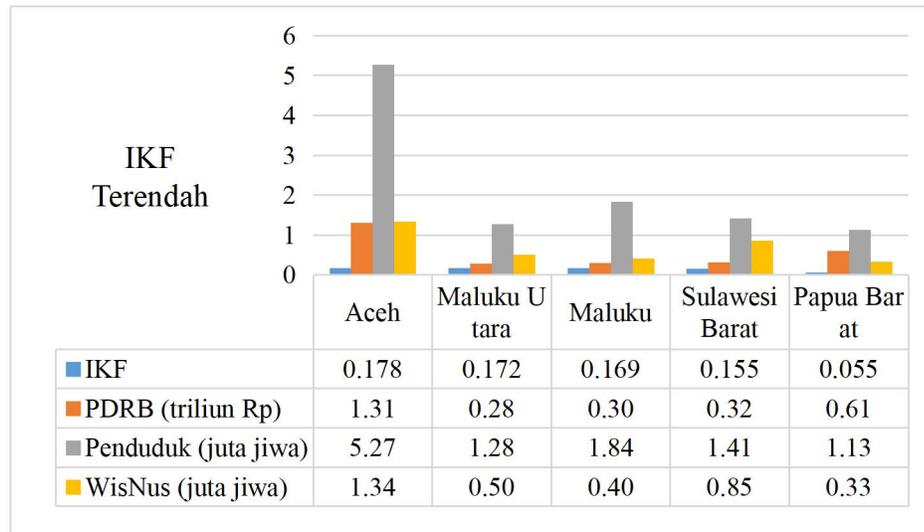
Keywords: PAD, PDRB, Penduduk, Wisatawan Nusantara

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara. Total sampel adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat melalui publikasi dan website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hasil penelitian membuktikan secara parsial pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan nusantara. Hal ini terbukti pada uji parsial, nilai signifikansi yang dihasilkan dari semua variabel independen berada kurang dari 0,05. Akan tetapi, pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan) dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara, terlihat pada uji simultan dengan nilai f -hitung 13.91490 yang lebih besar daripada f -tabel 2,745915. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh secara parsial tidak dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan nusantara. Tetapi secara simultan PAD dapat dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara. Sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dianggap masih kurang dapat memanfaatkan sumber daya daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya, baik di sektor ekonomi, demografi, dan pariwisata.

PENDAHULUAN

Laporan Reviu atas Kemandirian Fiskal Daerah yang dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 diketahui bahwa, provinsi yang berstatus mandiri memiliki keunggulan masing-masing seperti DKI Jakarta dengan nilai PDRB yang tinggi, Jawa Barat

dengan jumlah penduduknya, dan Kabupaten Badung yang sempat berstatus Sangat Mandiri dengan jumlah wisatawannya.



Sumber : BPK dan BPS Republik Indonesia

Gambar 1. Provinsi dengan Indeks Kemandirian Fiskal Terendah 2020

Lebih lanjut dalam laporan tersebut diketahui 5 provinsi yang memiliki IKF terendah yaitu Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Dari kelima provinsi itu, dapat dilihat dapat dilihat bahwa mulai dari nilai PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara Provinsi Aceh memiliki nilai yang cukup besar ketimbang 4 provinsi lainnya, akan tetapi memiliki status kemandirian fiskal dibawah 0,25 atau belum mandiri. Lebih rinci lagi diketahui rata-rata IKF Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh kurang dari 0,2, yang berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih belum mandiri dalam membiayai urusan pemerintahannya atau masih bergantung oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya.

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Hal ini ditunjukkan dari nilai PDRB-nya yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dengan PDRB tertinggi ada di Kabupaten Aceh Utara yang didominasi oleh sektor pertanian. Kenaikan atau pertumbuhan perekonomian ini akan berpotensi meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Juliansyah (2018) kapasitas seseorang untuk memenuhi beberapa kebutuhan keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah meningkat seiring dengan peningkatan pendapatannya, dengan kata lain peningkatan produk domestik regional bruto dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh menempati urutan ke-6 sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau sumatera yaitu sebesar 5,2 juta jiwa (2020) dengan rata-rata jumlah penduduk tiap-tiap Kabupaten/Kota sebesar 200 ribu jiwa (2020) dan diproyeksikan mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Aceh Utara, besarnya penduduk Kabupaten Aceh Utara ini dibarengi dengan nilai produk domestik regional bruto yang tinggi atau menjadi tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Menurut Susanto (2014), semakin tinggi jumlah penduduk yang produktif maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa serta terciptanya peluang usaha yang akan berimbas pada peningkatan PDRB.

Selain itu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki potensi pariwisata yang signifikan, didukung oleh sejarah Kesultanan Aceh yang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Situs-situs bersejarah dapat ditemukan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota-nya. Daerah dengan jumlah wisatawan terbesar pada tahun 2020 adalah Aceh Utara mencapai 488 ribu wisatawan yang sebagian besar merupakan wisatawan nusantara, Aceh Utara terkenal keindahan alamnya dan wisata religi, salah satu lokasi yang terkenal adalah gunung Salak dan makam Cut Meutia sebagai salah satu pahlawan nasional. Kota Sabang juga merupakan daerah yang menawarkan wisata bahari dikarenakan lokasi daerahnya yang merupakan daerah kepulauan yaitu kepulauan weh, kunjungan wisatawan mancanegara terbesar ada pada kota ini yaitu sebesar 2.363 wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2022. Kemudian ada Kota Banda Aceh dengan Masjid Raya Baiturrahman menjadi salah satu masjid tertua peninggalan Kesultanan Aceh. Berdasarkan laporan kunjungan dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada rentang tahun 2020-2023, wisatawan nusantara merupakan wisatawan terbesar yang melakukan kunjungan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Dengan melihat keunggulan dan potensi yang dimiliki daerah-daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat memperoleh pendapatan asli daerah hingga dapat menciptakan kemandirian fiskal di daerahnya dan melihat status kemandirian fiskal Provinsi Aceh yang berstatus belum mandiri, padahal memiliki berbagai kelebihan dari sektor PDRB, penduduk, dan wisatawan nusantara membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan Nusantara terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder. Menurut Ahyar (2020), penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya dengan maksud untuk menciptakan dan memanfaatkan model matematis, teori, dan/atau hipotesis yang terkait dengan suatu fenomena. Minta dkk., (2022) menginterpretasikan analisis dengan jenis data sekunder sebagai penggunaan informasi yang telah diperoleh oleh pihak lain, dengan melakukan analisis statistik dan interpretasi yang berbeda dari penelitian asalnya untuk memperoleh wawasan baru. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari instansi yang melakukan pendataan atau statistik di Republik Indonesia yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs resminya www.bps.co.id yang diakses pada tahun 2023, Kementerian Keuangan (DJPK), dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), serta laporan keuangan tahunan tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2020 hingga 2022.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Menurut Madany (2022), Analisis regresi data panel merupakan kombinasi antara data deret waktu (*time series*) dan data lintas sektoral (*cross section*). Regresi data panel digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Data dalam analisis ini dikumpulkan secara simultan pada berbagai unit pengamatan, yang disebut sebagai data lintas individu. Seiring dengan itu, data juga dikumpulkan dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini terbukti dari nilai signifikansi sebesar $0.0769 > 0,05$ dan nilai t-statistic sebesar 1.797567 yang memiliki arti PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap PAD. Hal ini seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2022) dan Asmuruf (2015) yang menyimpulkan bahwa PAD tidak dipengaruhi oleh PDRB, dalam kesimpulan penelitiannya dijelaskan bahwa PDRB yang mengalami penurunan tetapi PAD tetap mengalami kenaikan dan minimnya perekonomian yang mendorong peningkatan PAD menjadi penyebab tidak berpengaruhnya PDRB terhadap PAD.

Berdasarkan data penelitian, PAD rata-rata di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh turun pada tahun 2021 akan tetapi nilai PDRB ADHK-nya masih mengalami pertumbuhan yang stabil, hal ini mengindikasikan bahwa penurunan dan kenaikan PAD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tidak dipengaruhi oleh bertumbuhnya sektor-sektor ekonomi di wilayahnya, padahal seharusnya peningkatan PDRB akan berimbas ke kenaikan pendapatan masyarakat serta aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah.

Dalam publikasi Provinsi Aceh dalam Angka 2023, pada tahun 2022 diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor terbesar di Provinsi Aceh dengan persentase 29,43% dari total PDRB atas dasar harga berlaku, kemudian dilanjutkan dengan sektor perdagangan 13,87%, dan sektor pertambangan dan penggalian 9,99%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perekonomian Provinsi Aceh berasal dari sektor pertanian, dimana pada sektor tersebut pendapatan yang dihasilkan oleh pekerjanya terbilang kecil sehingga dampaknya tidak terlalu besar terhadap aktivitas perekonomian sekitar maupun terhadap pendapatan daerahnya. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah (2018), yang menemukan bahwa daerah penelitiannya memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian.



Sumber : DJPK, Realisasi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2020-2023

Gambar 2. Persentase Rata-rata PAD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Kemudian jika melihat pendapatan asli daerah pada tiap-tiap kabupaten dan kota-nya, dapat diketahui bahwa rata-rata sumber pendapatan asli daerahnya kabupaten/kota di Provinsi Aceh bersumber dari “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” dengan kontribusi kurang lebih 60-70% dari total pendapatan asli daerah, pajak 14-17%, retribusi 9-13% dan sisanya 3-4% hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Faktor-faktor PDRB yang dapat menjadi pemasukan terhadap PAD biasanya berasal dari pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak penerangan jalan (listrik), dan PBB. Namun dapat dilihat bahwa pendapatan akan pajak di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh hanya berkontribusi 17,54% dari total PAD-nya. Hal ini diduga dikarenakan sektor perekonomian terbesarnya merupakan sektor pertanian yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap PAD, pendapatan hasil penjualan dan ekspor hasil pertanian hanya akan berkontribusi kepada pajak ekspor, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai dimana berdasarkan undang-undang hal ini akan memengaruhi pendapatan pemerintah pusat sedangkan pajak kendaraan dan bahan bakar-nya disetor kepada pemerintah provinsi.

Dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diketahui PAD-nya pada tahun 2020 sebesar Rp193,59 miliar kemudian turun di 2021 sebanyak 14,74% menjadi Rp165,06 miliar. Akan tetapi PDRB ADHK-nya terus meningkat dari 2020-2022. Kontribusi terbesar atas nilai PAD pemerintah daerahnya pada tahun 2021 ialah lain-lain PAD yang sah, yaitu sebesar Rp144.170.908.190,35 atau sekitar 87,34% dari total PAD-nya. Lebih rinci lagi pendapatan terbesar bersumber dari pendapatan BLUD yaitu sebesar Rp112.339.682.705,36 atau 68,06% dari total PAD, dilanjutkan oleh pendapatan zakat dan pendapatan dana kapitasi JKN. Kemudian terlihat juga dalam rancangan APBD Kabupaten Aceh Utara 2023, dapat dilihat bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp244.385.822.907, dimana 76,52% bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan yang dianggarkan terbesar di dalamnya adalah pendapatan BLUD. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya PAD Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Utara didorong oleh pendapatan dari BLUD-nya.

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mewakili dua dimensi berbeda, meskipun keduanya adalah elemen yang penting dalam analisis ekonomi daerah, hubungan langsung antara Pendapatan BLUD dan PDRB mungkin tidak selalu terjadi secara langsung. Pendapatan BLUD biasanya lebih terkait dengan sektor pelayanan publik tertentu, sedangkan PDRB mencerminkan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Jika pertumbuhan PDRB terutama disebabkan oleh sektor-sektor non-pajak, seperti sektor jasa, yang kurang memberikan kontribusi pada penerimaan pajak daerah, maka PAD mungkin tidak meningkat sebanding.

Penting untuk memahami struktur ekonomi dan sumber-sumber pendapatan daerah tertentu untuk menilai hubungan antara produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara lebih akurat. Faktor-faktor tersebut dapat bervariasi antar daerah, sehingga analisis spesifik terhadap kondisi setiap daerah diperlukan untuk memahami korelasi antara PDRB dan PAD. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat, fluktuasi ekonomi nasional, atau perubahan dalam regulasi perpajakan dapat mempengaruhi PAD lebih daripada pertumbuhan PDRB di tingkat daerah. Variabilitas inilah yang membuat PDRB tidak selalu menjadi indikator langsung dari kesejahteraan keuangan pemerintah daerah.

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat dari nilai signifikansinya sebesar $0.2243 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 1.226922. Artinya Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini serupa dengan penelitian Batik (2013) dan Juliansyah (2018), yang mengatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD, hal ini diketahui dikarenakan tidak produktifnya penduduk serta rendahnya pendapatan yang diperoleh penduduk di daerahnya. Rendahnya pendapatan dan produktifitas maka akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat atas barang dan jasa sehingga permintaan atas

barang dan jasa menjadi sedikit yang berimbas pada berkurangnya tingkat produksi dan kebutuhan akan tenaga kerja sehingga meminimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu hal yang diduga menjadi penyebab tidak adanya pengaruh pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh adalah pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia, dimulai tahun 2019 dan lebih besar dampaknya pada tahun 2020 dan 2021. Pada saat itu pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran penyakit tersebut, salah satunya adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) didasari dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan ini membuat perubahan pada gaya hidup mulai dari sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB ADHK rata-rata -0,37 dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, yang berarti telah terjadi kontraksi atau penurunan ekonomi. Wabah ini juga berimbas pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TKT) sebesar 6,17% tahun 2019, meningkat menjadi 6,59% pada tahun 2020. Minimnya aktivitas sosial ekonomi akibat pandemi yang terjadi, membuat pertumbuhan ekonomi disekitar mengalami penurunan dan masyarakat terbatas untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mendorong peningkatan PAD, seperti berlibur atau berwisata yang dapat memengaruhi besarnya pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan sebagainya yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota.

Laporan BPS tentang PDRB ADHK menurut jenis pengeluaran, diketahui pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Aceh tahun 2022 sebesar Rp113,875 miliar dimana pengeluaran akan penginapan dan hotel hanya sebesar Rp3,043 miliar, pengeluaran untuk rekreasi dan budaya sebesar Rp3,171 miliar dan pengeluaran untuk perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar Rp5,573 miliar jika digabungkan maka sekitar 15,45% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dapat diasumsikan bahwa sekitar 15,45% pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten/Kota melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah dan PBB. Sedangkan sisa pengeluaran lainnya berpotensi memengaruhi pendapatan pemerintah provinsi dan pusat, seperti pajak kendaraan, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Kemudian dilihat dari persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh yang terbilang besar pada tahun 2022, mencapai 14,75% atau sekitar 818,47 ribu jiwa yang berstatus miskin pada tahun 2022 atau berada pada peringkat 10 sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Salah satu kriteria penduduk dikatakan miskin di Provinsi Aceh adalah memiliki penghasilan di bawah Rp624.566 per bulan. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Aceh adalah Rp1.180.133, dimana Rp668.481 pengeluaran makanan dan sisanya Rp511.652 pengeluaran bukan makanan termasuk pajak, perumahan, pakaian dan sebagainya. Dapat diketahui bahwa sekitar 14,75% penduduk di Provinsi Aceh hanya dapat memenuhi kebutuhan untuk makan saja selama sebulan, sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup, terlebih untuk ikut serta berkontribusi terhadap sektor-sektor lain yang ada di daerahnya, seperti membeli rumah, makan di restoran, berwisata dan kegiatan lainnya yang menjadi sumber dari PAD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Dari segi tenaga kerja, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2022 di Provinsi Aceh terhitung mencapai 44,29% dari total penduduk, dimana rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp2.508.308 (pekerja formal) dan Rp1.733.550 (pekerja informal), angka ini dibawah dari rata-rata upah minimum yaitu sekitar Rp3.2 juta rupiah. Rendahnya pendapatan akan membuat aktivitas ekonomi masyarakat terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, sehingga hal-hal terkait dengan sumber pendapatan asli daerah, seperti liburan, menginap di hotel, makan di restoran, dan hiburan lain-nya tidak menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Diketahui bahwa pendapatan BLUD menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Pendapatan BLUD biasanya berasal dari pelayanan publik dan layanan kesehatan, pendidikan, atau sektor lainnya yang tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Misalnya, sebuah rumah sakit BLUD dapat mendapatkan pendapatan dari pelayanan medis, yang tidak hanya tergantung pada jumlah penduduk, tetapi juga pada jenis dan kualitas pelayanan yang disediakan. Ada kemungkinan juga bahwa pendapatan BLUD didukung oleh sumber pembiayaan alternatif, seperti dana dari pemerintah pusat, hibah, atau kerjasama dengan sektor swasta. Hal ini dapat membuat pendapatan BLUD tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Terbatasnya pergerakan masyarakat sehingga tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, kemudian aktivitas yang dilakukan masyarakat terbatas pada hal-hal yang tidak ikut serta dalam peningkatan PAD dan rendahnya pendapatan masyarakat membuat jumlah penduduk yang besar di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak terlalu memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerahnya. Hal ini dapat terlihat dari kecilnya pendapatan dari sebagian besar yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu pada pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan sumber daya daerah yang seharusnya dapat dipengaruhi oleh besarnya aktivitas perekonomian yang disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk di daerahnya.

Hubungan antara Jumlah Penduduk dan PAD sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Analisis yang lebih mendalam tentang struktur ekonomi lokal, kebijakan fiskal, dan lainnya diperlukan untuk memahami secara lebih akurat bagaimana jumlah penduduk berdampak pada PAD suatu daerah.

Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan Nusantara Terhadap PAD

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa Jumlah Wisatawan Nusantara tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti dari nilai signifikansinya sebesar $0.5648 > 0,05$ dan nilai t-statistic sebesar 0.578689. Artinya Jumlah Wisatawan Nusantara tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini serupa dengan penelitian Yanti dkk., (2021).

Tabel 1. Profil Pariwisata Provinsi Aceh 2022

Profil Pariwisata	
Tingkat Hunian Hotel (%)	27%
Akomodasi	559
Kamar	9.894
Tempat Tidur	16.863
Lama Menginap Wisnus (Hari)	1,44
Jumlah Wisatawan Nutantara	1.710.171

Sumber : BPS, Provinsi Aceh dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkat hunian hotel yang ada di Provinsi Aceh sebesar 27% pada tahun 2022, jika diasumsikan dari 16.863 tempat tidur hanya sekitar 4.553 tempat tidur yang terisi (27% dari 16.863). Artinya 73% wisatawan nusantara yang melakukan kunjungan di Provinsi Aceh, tidak memesan kamar hotel atau menginap di hotel. Lebih lanjut dapat diketahui dari 27% wisatawan nusantara yang menghuni hotel atau menginap, wisatawan tersebut hanya menghabiskan waktu di hotel selama 1,44 hari. Hal inilah yang menunjukkan bahwa wisatawan nusantara lebih cenderung melakukan perjalanan harian atau akhir pekan ke destinasi wisata atau sekedar melakukan perjalanan bisnis daripada menginap atau berlibur panjang, dampak ekonominya mungkin lebih terfokus pada sektor-sektor tertentu seperti

makanan dan minuman, transportasi lokal, atau aktivitas harian. Hal ini bisa membuat dampak pada PAD menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan ketika wisatawan menginap dalam jangka waktu yang lebih lama karena pajak hotel, restoran dan hiburan merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten/Kota.

Pangsa pasar terbesar yang mendorong perekonomian di Provinsi Aceh adalah sektor pertanian dengan pangsa pasar dalam perekonomian sekitar 30%. Hal ini memberikan gambaran bahwa daerah yang telah berhasil mendiversifikasi basis ekonominya mungkin kurang tergantung pada sektor wisata sebagai satu-satunya sumber pendapatan, pertumbuhan atau penurunan dalam sektor wisata tidak akan memiliki dampak yang signifikan pada PAD. Meskipun jika jumlah wisatawan meningkat, dampak positifnya pada PAD dapat terhambat oleh manajemen pariwisata yang tidak efisien. Misalnya, infrastruktur yang kurang mendukung, layanan publik yang buruk, atau kurangnya promosi yang efektif dapat mengurangi potensi pendapatan dari sektor pariwisata.

Berdasarkan APBD Kabupaten Aceh Utara tahun 2023, sebagai salah satu kabupaten yang memiliki jumlah wisatawan nusantara terbesar di Provinsi Aceh, anggaran pendapatan atas pajak hotel, restoran, dan hiburan sebesar kurang dari 1% dari total PAD-nya, hal ini juga terjadi juga pada APBD Kabupaten Aceh Besar (2021) dengan anggaran pendapatan atas pajak hotel, restoran, dan hiburan kurang dari 1%. Sedangkan anggaran pendapatan terbesarnya ialah dari pendapatan BLUD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak terlalu mengedepankan pendapatan atas pajak hotel, restoran dan hiburan dikarenakan adanya jenis pendapatan lain yang lebih diutamakan atau dapat juga diakibatkan oleh kondisi pariwisata di daerah-nya yang tidak terlalu berkembang sehingga potensi untuk berkontribusi pada pendapatan asli daerah tidak besar.

Keberhasilan dampak ekonomi wisatawan nusantara pada PAD dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan pengelolaan pariwisata daerah. Kebijakan yang mendukung kerjasama antara sektor pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lokal lainnya dapat meningkatkan kontribusi wisatawan nusantara terhadap PAD.

KESIMPULAN

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto, terbukti dari nilai T-hitung (1.797567) < T-tabel (1,996008), yang berarti PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak dipengaruhi oleh besarnya PDRB. Maka hipotesis pertama ditolak.
2. Pendapatan Asli Daerah tidak dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk, terbukti dari nilai T-hitung (1.226922) < T-tabel (1,996008), yang berarti PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak dipengaruhi oleh besarnya Jumlah Penduduk. Maka hipotesis kedua ditolak.
3. Pendapatan Asli Daerah tidak dipengaruhi oleh Jumlah Wisatawan Nusantara, terbukti dari nilai T-hitung (0.578689) < T-tabel (1,996008), yang berarti PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak dipengaruhi oleh besarnya Jumlah Wisatawan Nusantara. Maka hipotesis ketiga ditolak.
4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh secara simultan dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-hitung sebesar 13.91490 > F-tabel 2,745915. Maka hipotesis keempat penulis diterima.

DAFTAR REFERENSI

- Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (H. Abadi, Ed.). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Asmuruf, Makdalena F Rumate, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021). *Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*.
- Badan Pusat Statistik RI. (2023). *Provinsi Aceh dalam Angka 2020-2023*.
- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 125. <https://doi.org/10.22219/jep.v11i1.3735>
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(02), 58–64.
- Juwita, R., & Widia, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Land Journal*, 3(1), 69–76. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1750>
- Minta, S., Suriani, & Meutia, R. (2022). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Masyarakat di Provinsi Aceh dengan Regresi Data Panel. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1577>
- Silaban, P. H., & Silalahi, A. D. K. (2020). *Kepuasan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Danau Toba*. (W. Kurniawan, Ed.), *Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research* (Cetakan Pe, Vol. 4). Kab. Banyumas, Jawa Tengah: CV. Pena Persada. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>
- Susanto, I. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk dan Inflasi. *Jurnal Ilmiah*, 1–16.
- Yanti, N. N. L. A., Aziz, I. S. A., & Wulandari, I. G. A. A. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Lamanya Menginap Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar Tahun 2011-2019. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(2), 60–67. <https://doi.org/10.22225/wedj.4.2.2021.60-67>